

# STATISTIK GENDER KABUPATEN DEMAK 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN DEMAK**

# STATISTIK GENDER KABUPATEN DEMAK 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN DEMAK**

# Statistik Gender Kabupaten Demak 2022

**ISSN/ISBN:** -

**No. Publikasi:** 33210.2307

**Katalog:** 2104012.3321

**Ukuran Buku:** 21 x 29,7 cm

**Jumlah Halaman:** xi + 46 halaman

**Naskah:**

BPS Kabupaten Demak

**Penyunting:**

BPS Kabupaten Demak

**Desain Sampul oleh:**

BPS Kabupaten Demak

**Penerbit:**

© BPS Kabupaten Demak

**Pencetak:**

**Sumber Ilustrasi:**

Canva.com

freepik.com

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

<https://demakkab.bps.go.id>

## **Tim Penyusun**

### **Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak

### **Penanggung Jawab:**

Henri Wagiyanto, S.Pt, M.Ec.Dev. MA

### **Editor:**

Muhamad Abdul Aziz, SST.

### **Penulis:**

Aji Wahyu Ramadhani, SST, M.Si

### **Gambar Kulit:**

### **Diterbitkan Oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak

### **Dicetak Oleh:**

BPS Kabupaten Demak

### **Sumber Ilustrasi:**

canva.com

freepik.com

<https://demakkab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

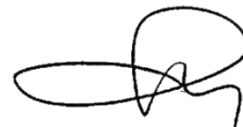
Publikasi Statistik Gender di Kabupaten Demak 2022 mencakup ulasan tentang perkembangan pencapaian pembangunan gender (IPG) dan pemberdayaan gender (IDG) di Kabupaten Demak.

IPG merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada gender. Sedangkan IDG memberi gambaran mengenai pemberdayaan peran perempuan dalam hal pengambilan keputusan dan ketenagakerjaan. Data IPG dan IDG yang dibahas pada publikasi ini mencakup data tahun 2018-2022.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini disampaikan terimakasih. Untuk menyempurnakan penyusunan publikasi ini di masa depan, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Demak, September 2023

**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Demak  
Kepala**



**HENRI WAGIYANTO**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Sistematika Tulisan.....	2
1.4 Sumber Data.....	2
1.5 Ruang Lingkup.....	2
BAB II METODOLOGI.....	3
2.1 Metodologi IPG .....	3
2.1.1 IPG Metode Baru.....	4
2.1.2 Penyusunan Indeks Komposit .....	5
2.1.3 Perubahan Interpretasi.....	9
2.2 Metodologi IDG .....	10
2.1.4 Penyusun Indeks Komposit .....	10
BAB III PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER .....	13
3.1 Kependudukan.....	13
3.1.1 Komposisi Penduduk.....	13
3.1.2 Struktur Penduduk.....	13
3.2 Pembangunan Gender.....	16
3.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) .....	17
3.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....	19
3.2.3 Pengeluaran per Kapita.....	21
3.3 Pemberdayaan Gender.....	23
3.3.1 Keterwakilan Perempuan di Parlemen.....	26

3.3.2 Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi .....	27
3.3.3 Sumbangan Pendapatan.....	28
<b>BAB IV GENDER DI PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Gender di Bidang Pendidikan .....	31
4.2 Gender di Bidang Ketenagakerjaan .....	33
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>37</b>

<https://demakkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG.....	5
Tabel 2.2	Dimensi dan Indikator IDG .....	10
Tabel 3.1	Perkembangan IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG Kabupaten Demak, 2018-2022 .....	17

<https://demakkab.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penyusunan IPG .....	9
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2022 .....	14
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Kabupaten Demak Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	14
Gambar 3.3	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Demak, 2018-2022.....	15
Gambar 3.4	Perkembangan IPG Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022 .....	16
Gambar 3.5	Perkembangan AHH Kabupaten Demak, 2018-2022 (Tahun) .....	18
Gambar 3.6	Perkembangan HLS Kabupaten Demak, 2018-2022 (Tahun).....	20
Gambar 3.7	Perkembangan RLS Kabupaten Demak, 2018-2022 (Tahun).....	21
Gambar 3.8	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Demak, 2018-2022 (000 Rupiah) .....	22
Gambar 3.9	Perkembangan IDG Kabupaten Demak dan Jawa Tengah, 2018-2022.....	24
Gambar 3.10	Komponen IDG Kabupaten Demak, 2022 .....	25
Gambar 3.11	Perkembangan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kabupaten Demak, 2018-2022 .....	26
Gambar 3.12	Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Demak, 2018-2022 (persen).....	28
Gambar 3.13	Perkembangan Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Demak, 2018-2022 (persen).....	29
Gambar 4.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Demak, 2022 .....	31
Gambar 4.2	Rasio APM Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Demak, 2018—2022 .....	32
Gambar 4.3	TPAK Kabupaten Demak Menurut Jenis Kelamin, 2018—2022 .....	34
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Demak, 2022 ...	35

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi gender.

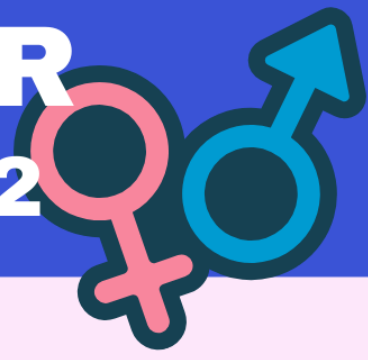
Oleh sebab itu, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah menjadi sasaran dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2025.

Peranan kaum perempuan terhadap pembangunan di Kabupaten Demak, tidak dapat disepelekan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, perempuan merupakan mitra kerja bagi laki-laki dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, perempuan yang berkualitas turut menentukan kualitas generasi penerus dalam keluarga.

Pembangunan gender dari sisi angka IPG, menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Demak secara konsisten terus meningkat dari 91,95 menjadi 92,48 selama 2018-2022. Peningkatan tersebut tidak lepas dari kenaikan variabel-variabel penyusunnya, terutama pencapaian bidang kesehatan dan pendidikan bagi kaum perempuan.

Pembangunan gender dari sisi angka indeks IDG, menunjukkan bahwa dalam periode yang sama, angka IDG Kabupaten Demak meningkat dari 66,83 menjadi 67,82. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena naiknya porsi perempuan dalam keterwakilan di dalam anggota parlemen daerah dan perkembangan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Namun demikian, pada indikator penyusun persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

# STATISTIK GENDER KABUPATEN DEMAK 2022



## Jumlah Penduduk



**1.223.217 Jiwa**

Dengan tingkat sex ratio 101,9 menunjukkan tiap 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan

## Angka Harapan Hidup (AHH), tahun



**73,69**



**77,45**

Faktor-faktor yang memengaruhi AHH diantaranya gaya hidup, pola makan, dan faktor genetik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan

## Harapan Lama Sekolah (HLS)



**13,31**



**13,53**

HLS menunjukkan lama tahun sekolah yang diharapkan pada anak usia 7 tahun yang akan dirasakan di masa mendatang

## Pengeluaran per Kapita, ribu rupiah



**15.408**

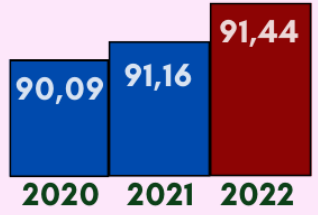


**9.077**

Pengeluaran per kapita digunakan sebagai pendekatan atas pendapatan sebagai kriteria hidup layak. Nilai ini bergantung pada konsumsi masyarakat

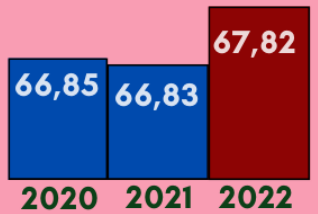
## Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mengalami kenaikan sejak 2018 hingga 2022. Namun, nilainya masih di bawah IPG provinsi Jawa Tengah



## Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG mengalami fluktuasi pada 2018-2022. Terjadi pelebaran gap antara IDG Jawa Tengah dan Kab. Demak



## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan kemampuan penduduk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh hasil pendapatan, kesehatan, dan pendidikan



**13,31**



**13,53**

## Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang ketenagakerjaan dengan gap yang membesar pada 2022



**82,16**



**52,29**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Realitas kehidupan seringkali menunjukkan sesuatu yang menarik untuk diamati. Salah satunya mengenai perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam status sosial di masyarakat, yang menjadikan kaum laki-laki lebih diunggulkan dari kaum perempuan. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan.

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDG's) nomor ke-5, yaitu *gender equality* atau mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu mencapai kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai sisi kehidupan masyarakat, pemerintah senantiasa berupaya untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan penduduknya baik itu laki-laki maupun perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Demak. Strategi dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender inilah yang disebut pengarusutamaan gender yang untuk rencana implementasinya diperlukan suatu analisis gender.

Dalam analisis dan pembahasan tentang gender diperlukan data dan fakta serta informasi tentang gender, yaitu tersedianya data dari berbagai indikator pembangunan yang terpilah antara laki-laki dan perempuan yang dapat menggambarkan kesenjangan gender di

Kabupaten Demak. Diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai pembuka wawasan tentang pembangunan manusia yang berbasis gender.

## **1.2 Tujuan**

Publikasi ini disusun untuk menyajikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan manusia dilihat dari sudut pandang gender (pembangunan antara perempuan dan laki-laki) yang direpresentasikan dengan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

## **1.3 Sistematika Tulisan**

Pembahasan dalam penulisan publikasi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, sistematika penulisan, sumber data dan ruang lingkup.

Bab 2 menjelaskan tentang Metodologi.

Bab 3 menjelaskan tentang pencapaian IPG dan IDG di Kabupaten Demak.

Bab 4 menjelaskan gender di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Bab 5 berisi kesimpulan.

## **1.4 Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Maret 2022 (Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi) dan Sakernas Agustus 2022.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup wilayah di Kabupaten Demak. Indikator gender yang dikupas antara lain mencakup segmen kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai komponen pembentuk IDG.

## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1 Metodologi IPG

Indeks Pembangunan Gender diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender, tetapi hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak dapat diinterpretasikan terpisah dari IPM.

United Nations Development Programs (UNDP) melalui Laporan Pembangunan Manusia Tahun 1995, memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat gabungan (komposit) dari empat indikator yang menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG mengukur hal yang sama seperti IPM, hanya komponen yang digunakan dibedakan menurut jenis kelamin. Melalui IPG, perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan. Kesetaraan pembangunan laki-laki dan perempuan tercapai sepenuhnya apabila nilai IPG mencapai 100.

Pada tahun 2014, UNDP melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga dapat terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

### 2.1.1 IPG Metode Baru

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup yang hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas, karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup (AHH) saat lahir yang diperoleh dari data Sensus Penduduk. Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang diperoleh dari data Susenas, menggantikan indikator metode sebelumnya yaitu angka melek huruf (AMH).

Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita pada kabupaten/kota. Sehingga untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang diperoleh dari Susenas.

Penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini



digunakan sebagai tolok ukur *output* dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator *input* maupun indikator *output*.

## 2.1.2 Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya, hanya pada batasan nilai maksimum dan minimum seperti pada tabel 2.1

**Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG**

Indikator	Maksimum		Minimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Harapan Hidup (tahun)	82,5	87,5	17,5	22,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	18	0	0
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	15	0	0
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp)	26.572.352		1.007.436	

Dalam penyusunan IPG terdapat 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran yang masing-masing dalam penghitungannya menggunakan angka maksimum dan minimum sebagaimana pada tabel 2.1. dengan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Dimensi Kesehatan

Pada dimensi kesehatan, dihitung  $I_{kesehatan}$  dengan menggunakan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) dengan  $AHH_{maks}$  dan  $AHH_{min}$  seperti pada tabel 2.1 dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

## 2. Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan terdapat 2 (dua) komponen yaitu HLS dan RLS. Untuk menghitung  $I_{pendidikan}$  terlebih dahulu dilakukan penghitungan  $I_{HLS}$  dan  $I_{RLS}$ . Pada penghitungan indeks HLS, untuk mengakomodasi penduduk yang tidak cukup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren dengan sumber data pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam, dengan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

keterangan:

$HLS_a^t$  : Harapan Lama Sekolah pada umur  $a$  di tahun  $t$

$E_i^t$  : Jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$

$P_i^t$  : Jumlah penduduk usia produktif usia  $i$  pada tahun  $t$

$i$  : Usia ( $a, a+1, \dots, n$ )

$FK$  : Faktor koreksi pesantren

Adapun penghitungan Faktor Koreksi ( $FK$ ) diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

- Menghitung rasio santri mukim

$$\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{jumlah bermukim}}{\text{jumlah santri seluruhnya}}$$

- Menghitung jumlah santri yang bersekolah dan bermukim

$$\text{jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{jumlah santri sekolah}$$

- Menghitung faktor koreksi

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{\text{jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Selanjutnya untuk memperoleh  $I_{pendidikan}$  adalah sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

di mana

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \text{ dan } I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

### 3. Dimensi Pengeluaran

Pada dimensi pengeluaran terdapat komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Komponen ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Sedangkan penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas yang sebagian besarnya merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan Paritas Daya Beli (PPP) adalah menggunakan Metode Rao dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$PPP_{ij} = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

di mana:

$p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$

$p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan

$m$  : jumlah komoditas

Kemudian dapat dihitung  $I_{pengeluaran}$  dengan rumus:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Setelah dilakukan penghitungan semua indeks pada dimensi pembentuk IPG, dilakukan metode agregasi untuk mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{kesehatan L} \times I_{pendidikan L} \times I_{pengeluaran L}}$$
$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{kesehatan P} \times I_{pendidikan P} \times I_{pengeluaran P}}$$

keterangan: P = perempuan, L = laki-laki

Metode ini digunakan karena rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi membandingkannya dengan angka IPM, tetapi dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka IPG tersebut menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100 maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Sebaliknya, jika makin menjauhi 100 maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

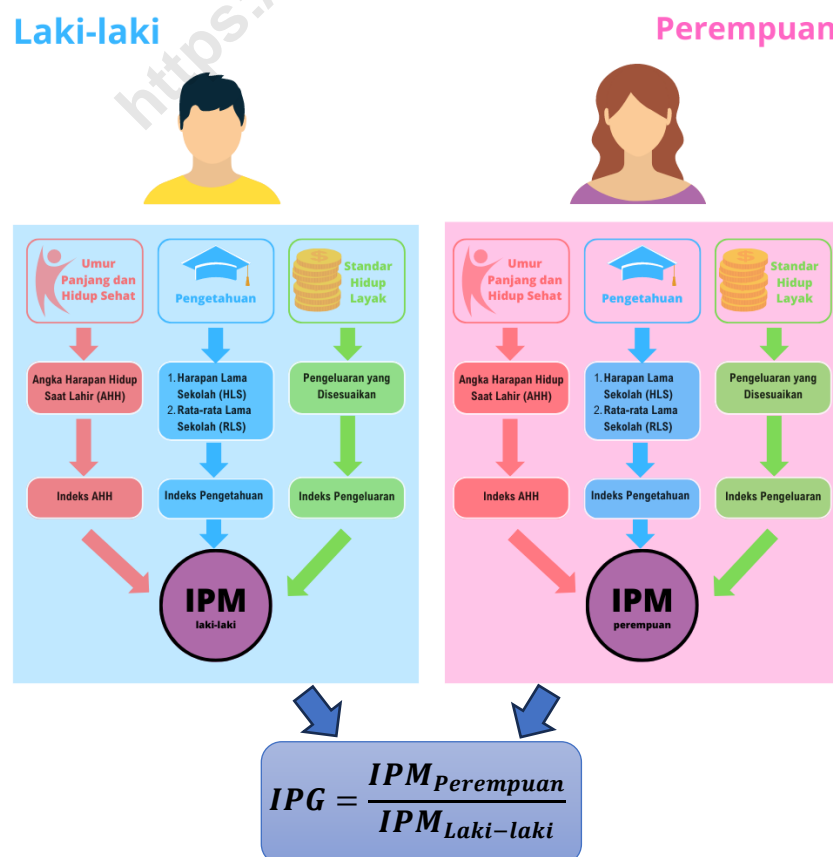
### 2.1.3 Perubahan Interpretasi

Akibat adanya perubahan metodologi, terjadi perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM maka makin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, makin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka makin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Untuk lebih mudah dalam memahami alur dalam penyusunan IPG, secara ringkas dapat pula dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Penyusunan IPG**



## 2.2 Metodologi IDG

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah angka yang dapat menunjukkan seberapa besar peranan laki-laki dan perempuan di kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG mengacu pada metodologi berikut:

**Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator IDG**

Dimensi	Indikator
<b>Keterwakilan di Parlemen</b>	Proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen
<b>Pengambilan Keputusan</b>	Proporsi laki-laki dan perempuan sebagai pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi
<b>Distribusi Pendapatan</b>	Upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian

### 2.1.4 Penyusun Indeks Komposit

Dalam penghitungan IDG, sebelumnya dilakukan penghitungan terlebih dahulu Indeks Keterwakilan di Parlemen ( $I_{(par)}$ ), Indeks Pengambilan Keputusan ( $I_{(DM)}$ ), dan Indeks Distribusi Pendapatan ( $I_{(inc-dis)}$ ).

- Indeks keterwakilan di parlemen  $I_{(par)}$  dihitung dengan rumus

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

di mana

$$EDEP_{(par)} = \left( \frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

keterangan:

- $P_f$  = proporsi penduduk perempuan  
 $P_m$  = proporsi penduduk laki-laki  
 $X_f$  = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen  
 $X_m$  = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen  
 $EDEP_{(par)}$  = persentase ekuivalen yang terdistribusi sama

- Indeks pengambilan keputusan dihitung dengan rumus:

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

di mana:

$$EDEP_{(DM)} = \left( \frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right) \times 100^{-1}$$

- $p_f$  = proporsi penduduk perempuan  
 $p_m$  = proporsi penduduk laki-laki  
 $y_f$  = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional  
 $y_m$  = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional  
 $EDEP_{(DM)}$  = equally distributed equivalent percentage

- Indeks Distribusi Pendapatan

Dalam memperoleh Indeks Distribusi Pendapatan dilakukan beberapa tahapan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio upah}_i = \frac{\text{upah buruh non pertanian}_i}{\text{upah buruh non pertanian}_m}$$

*Rata – rata upah*

$$\begin{aligned} &= (\text{rasio upah}_m \times \text{proporsi angkatan kerja}_m) \\ &+ (\text{rasio upah}_f \times \text{proporsi angkatan kerja}_f) \end{aligned}$$

$$\text{Rasio terhadap rata – rata upah}_i = \frac{\text{Rasio upah}_i}{\text{rata – rata upah}}$$

Sumbangan pendapatan<sub>i</sub> = proporsi angkatan kerja<sub>i</sub> × rasio rerhadap rata – rata upah<sub>i</sub>

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi penduduk}_i}$$

di mana:

*i* = laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian, menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut:

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left( \frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1}$$

dan

$$I_{inc-dis} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran Perkapita(yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

di mana,

$p_f$  = proporsi penduduk perempuan

$P_m$  = proporsi penduduk laki-laki

$Z_f$  = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

$Z_m$  = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

$EDEP_{(inc-dis)}$  = persentase ekuivalen yang terdistribusi sama

Sehingga diperoleh IDG dengan rumus:

$$IDG = \frac{1}{3}(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})$$



## BAB III

### PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GENDER

#### 3.1 Kependudukan

##### 3.1.1 Komposisi Penduduk

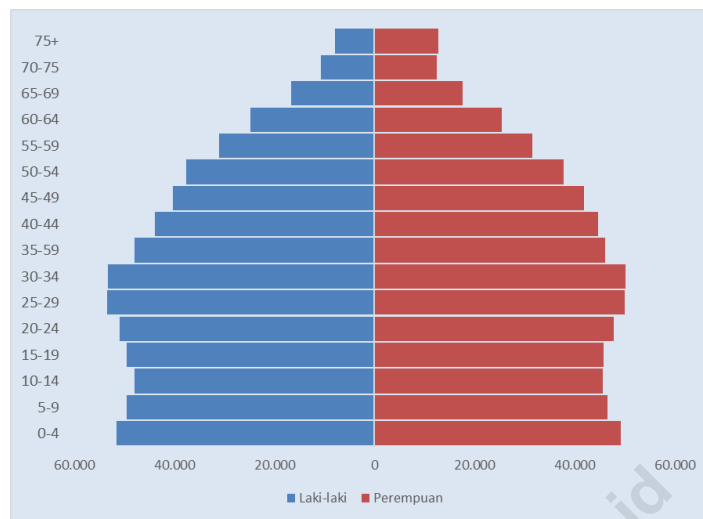
Jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2022 mencapai 1.223.217 yang terdiri dari 617.297 (50,47%) laki-laki dan 605.920 (49,53%) perempuan. Ada pun nilai *sex ratio* di Kabupaten Demak adalah sebesar 101,9 persen. Dapat diartikan bahwa pada tiap 100 orang perempuan di suatu wilayah terdapat 102 orang penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dapat diberdayakan dengan optimal agar menjadi aset dan potensi yang memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pembangunan.

##### 3.1.2 Struktur Penduduk

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk pada Gambar 3.1. Struktur umur penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Demak cenderung tergolong penduduk muda mengarah ke struktur penduduk stasioner. Hal ini ditandai dengan bagian bawah dan tengah piramida yang relatif besar dibandingkan bagian usia tua. Sementara itu, bagian bawah dan menengah relatif stabil hingga kelompok umur 45 - 49 tahun.

Struktur umur penduduk dapat pula dibagi menjadi penduduk usia produktif (15 - 64 tahun), belum produktif (0 - 14 tahun), dan tidak lagi produktif (65 tahun ke atas) yang dapat dilihat pada Gambar 3.2. Terlihat bahwa proporsi penduduk tidak produktif pada kelompok perempuan relatif lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan, proporsi penduduk laki-laki yang belum produktif cenderung lebih besar dibandingkan perempuan.

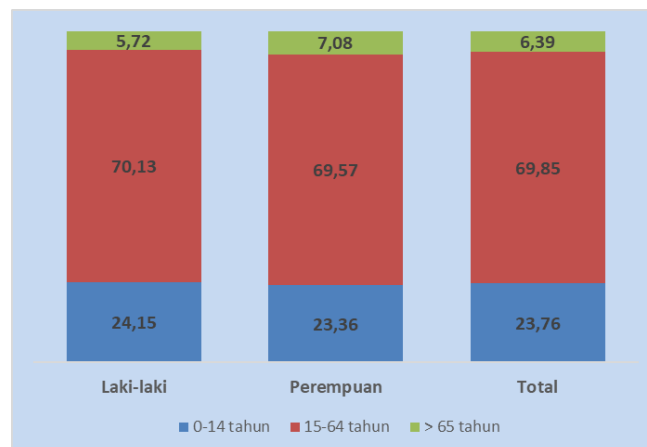
**Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Demak (diolah)

Berdasarkan gambar di bawah ini, diperoleh bahwa dari 100 orang laki-laki, kurang lebih terdapat sekitar 70 orang yang berada pada usia produktif. Sedangkan, 24 orang berada di usia belum produktif dan 6 orang berada di usia tidak lagi produktif. Lalu, dari 100 orang perempuan, diperkirakan terdapat 70 orang yang berusia produktif, 23 orang berada di usia belum produktif, dan 7 orang yang tidak lagi produktif. Apabila laki-laki dan perempuan dijumlahkan maka dari 100 orang, kurang lebih terdapat 70 orang yang berada pada usia produktif. Sedangkan, 24 orang berada di usia belum produktif dan 6 orang berada di usia tidak lagi produktif.

**Gambar 3.2 Persentase Penduduk Kabupaten Demak Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

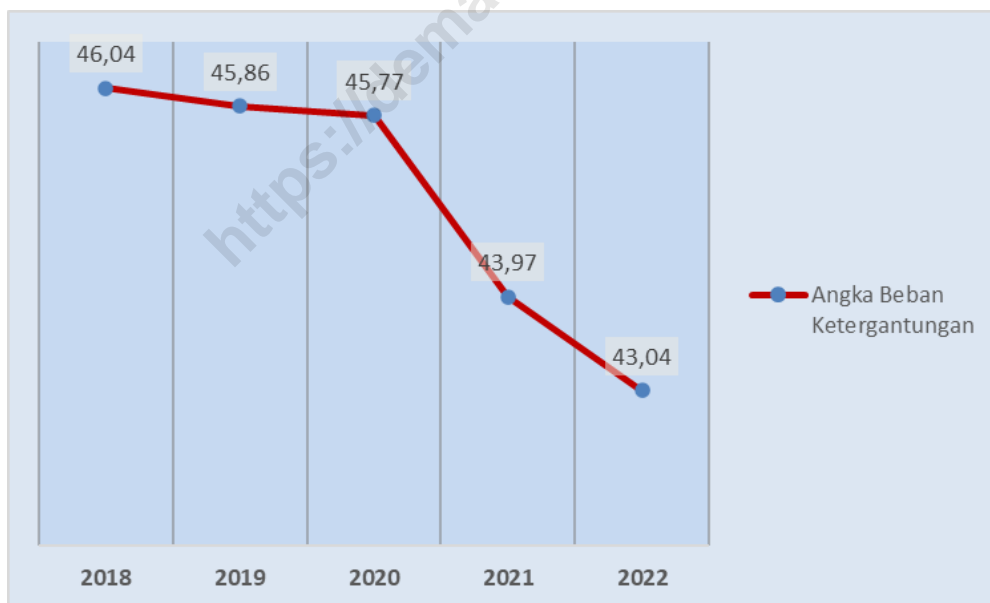


Sumber: BPS Kabupaten Demak (diolah)

### 3.1.2 Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Struktur umur penduduk berdasarkan kelompok umur yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan penduduk yang belum dan tidak lagi produktif terhadap penduduk yang berusia produktif. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 43,04 persen. Artinya, dari 100 orang penduduk yang berusia produktif menanggung sekitar 43 orang penduduk yang belum dan tidak lagi produktif. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 43,97 persen. Makin besar angka beban ketergantungan maka makin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif. Terlihat bahwa angka beban ketergantungan Kabupaten Demak mengalami tren penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 (lihat Gambar 3.3).

**Gambar 3.3** Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Demak, 2018-2022

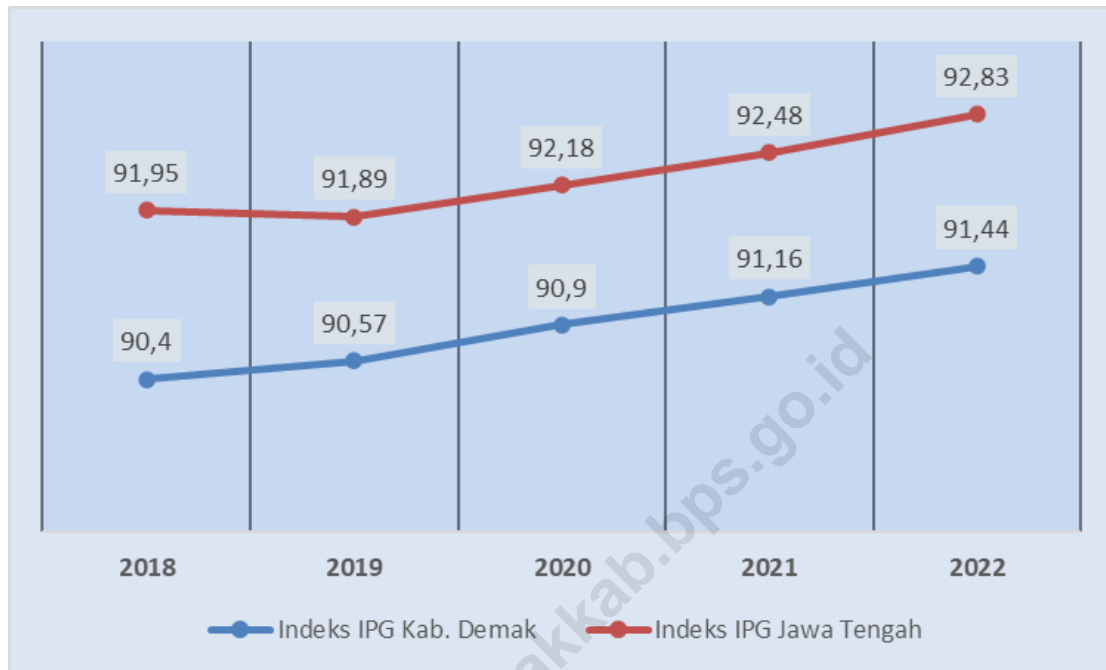


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Penurunan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Demak ini menunjukkan adanya bonus demografi yang akan dialami Kabupaten Demak, yaitu jumlah penduduk yang berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang belum dan tidak produktif lagi.

### 3.2 Pembangunan Gender

Gambar 3.4 Perkembangan IPG Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa IPG Kabupaten Demak selalu lebih rendah dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun terakhir. Diperoleh tren yang meningkat tiap tahun meskipun nilainya masih di bawah angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan masih belum setara atau terdapat ketimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan waktu yang lebih untuk mencapai kesetaraan dan kesamaan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, upaya terencana dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia, terutama pada perempuan, sehingga *gap* antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih kecil.

**Tabel 3.1 Perkembangan IPM Laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG Kabupaten Demak, 2018-2022**

Tahun (1)	IPM Laki-laki (2)	IPM Perempuan (3)	IPG (4)
2018	76,04	68,74	90,40
2019	76,57	69,35	90,57
2020	76,82	69,83	90,90
2021	77,05	70,24	91,16
2022	77,84	71,07	91,44

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Peningkatan IPG selama kurun waktu 2018 - 2022 sejalan dengan peningkatan IPM perempuan di Kabupaten Demak. Artinya, kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak terus mengalami peningkatan. Dengan kata lain, pertumbuhan IPM perempuan lebih tinggi dibandingkan IPM laki-laki meskipun kedua IPM sama-sama mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan IPM perempuan sebesar 0,83 poin dan IPM laki-laki sebesar 0,79 poin. Peningkatan IPG tersebut tentunya dipengaruhi oleh peningkatan komponen penyusun IPG itu sendiri, yakni Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita.

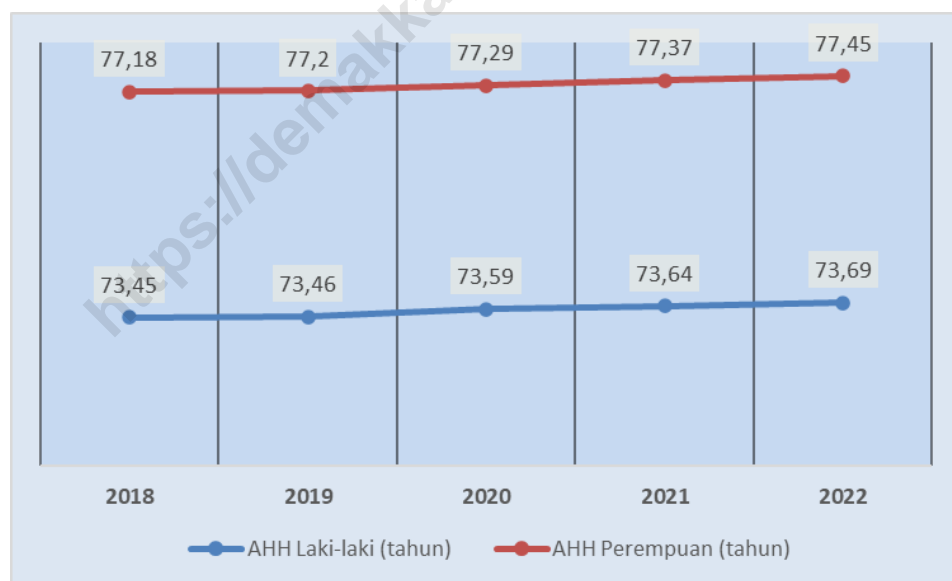
### 3.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari kondisi fisik yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa dan murah. Bersama angka kesakitan dan angka kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan

elemen kunci yang sering dijadikan sebagai salah satu barometer dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

AHH atau Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seorang bayi yang baru dilahirkan dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Dari Gambar 3.5 di bawah, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2018 - 2022, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan mengalami tren peningkatan. Laki-laki mencapai angka harapan hidup kurang lebih hingga usia 73 tahun, sedangkan perempuan hingga usia 77 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 0,08 tahun untuk perempuan dan 0,05 tahun untuk laki-laki.

**Gambar 3.5 Perkembangan AHH Kabupaten Demak, 2018-2022 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Banyak faktor penyebab rendahnya AHH laki-laki dibandingkan AHH perempuan seperti faktor bawaan lahir (genetis), gaya hidup, pola makan dan kemampuan bertahan hidup. Sejak lahir perempuan dibekali sepasang kromosom X, sedangkan laki-laki hanya satu kromosom X dan Y. Kromosom X mengandung lebih dari 1000 gen yang berperan dalam pengaturan hormon dan fungsi vital tubuh lainnya seperti pembekuan darah, metabolisme dan perkembangan janin. Sedangkan kromosom Y hanya mempunyai kurang dari 100 gen, yang

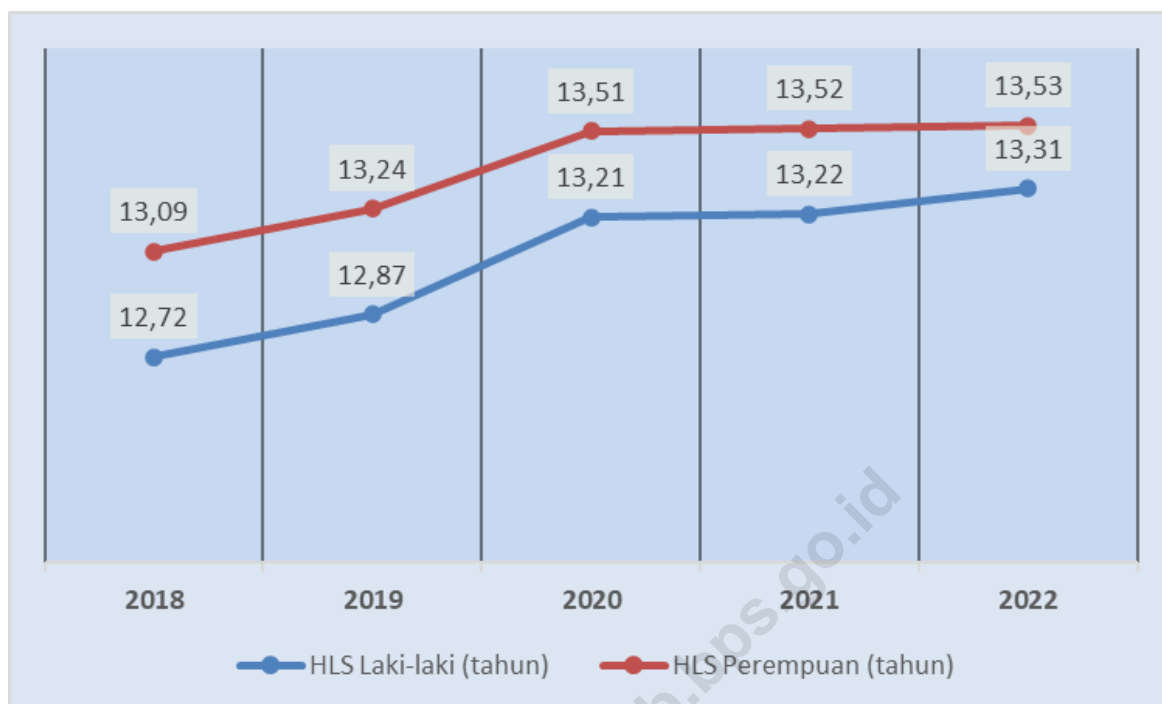
mempunyai fungsi utama hanya untuk pembentukan dan perkembangan testis dan hormonal. Oleh karena itu, apabila terjadi ketidakseimbangan (terinfeksi penyakit), secara biologis perempuan lebih mampu bertahan hidup dibanding laki-laki, terutama pada masa tahun pertama kehidupan.

### **3.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang akan menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan pendidikan membawa dampak positif yang nyata bagi kualitas manusia di masa mendatang. Salah satu Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam IPM maupun IPG adalah harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

HLS pada periode 2018 - 2022 memiliki tren peningkatan dari tahun 2018 - 2022, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Peningkatan yang terjadi tersebut adalah hampir sama sehingga tidak menimbulkan *gap* yang terlalu besar. Pada tahun 2022, HLS perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2021 dan HLS laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,09 tahun.

**Gambar 3.6 Perkembangan HLS Kabupaten Demak, 2018-2022 (Tahun)**



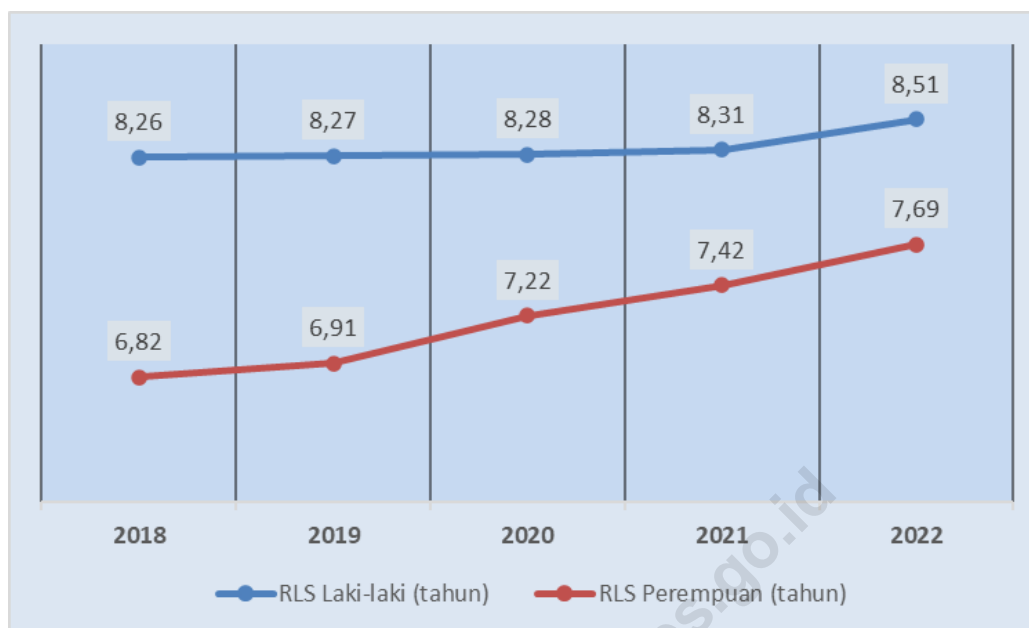
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Peningkatan HLS memberikan andil dalam meningkatkan nilai IPG. Peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan pada umumnya belum terlihat dalam jangka pendek. Pada tahun 2022, HLS laki-laki mencapai 13,31 tahun dan perempuan mencapai 13,53 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan memiliki harapan dapat bersekolah kurang lebih 13 hingga 14 tahun ke depan.

Untuk angka rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki secara umum lebih tinggi satu tahun dibandingkan dengan perempuan pada rentang waktu 2018 - 2022 (Gambar 3.7). Pada tahun 2022, RLS laki-laki mencapai 8,51 tahun atau naik 0,2 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,31 tahun. Artinya, pada tahun 2021 - 2022, tingkat pendidikan penduduk laki-laki di Kabupaten Demak kurang lebih setara dengan kelas 2 SMP. Lalu, RLS perempuan meningkat 0,27 tahun dari 7,42 tahun pada 2021 menjadi 7,69 pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk perempuan di Kabupaten Demak kurang lebih setara dengan kelas 1 SMP.



**Gambar 3.7 Perkembangan RLS Kabupaten Demak, 2018-2022 (Tahun)**



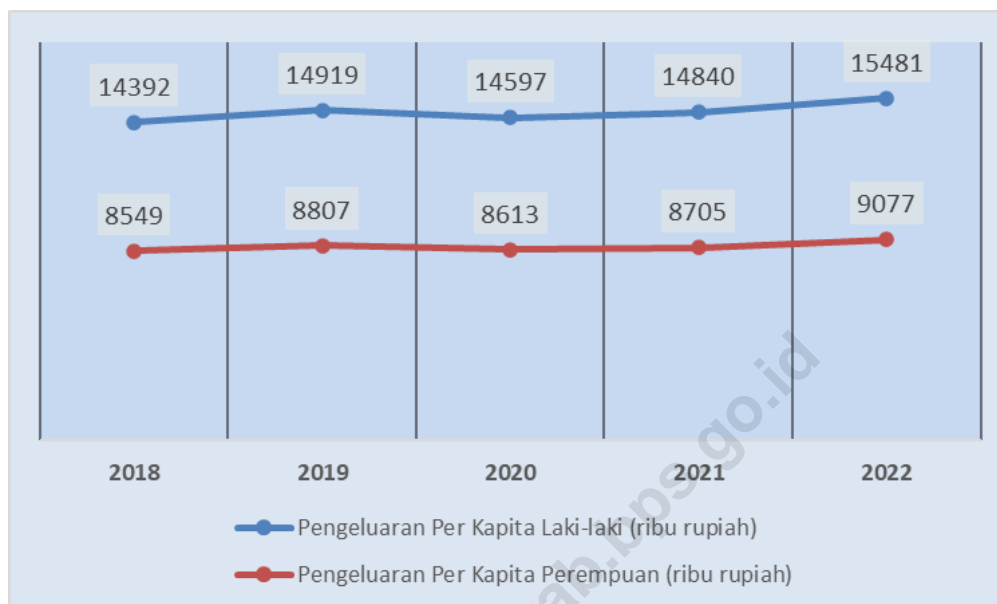
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Pada periode 2018 - 2022, secara umum perbedaan dan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan mengecil meskipun masih terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat *gap* kesetaraan pembangunan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengejar peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat, terutama bagi perempuan.

### 3.2.3 Pengeluaran per Kapita

Pada Gambar 3.8 di bawah ini, disajikan perkembangan pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan selama periode 2018 - 2022. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kecenderungan kenaikan konsumsi laki-laki dan perempuan secara konsisten mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan. Namun, terlihat bahwa selisih atau *gap* pengeluaran antara laki-laki dan perempuan cenderung melebar selama periode tersebut. Perbedaan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena perbedaan kebiasaan dan kebutuhan hidup.

**Gambar 3.8** Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Demak, 2018 - 2022  
(000 Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Pengeluaran per Kapita digunakan sebagai pendekatan atas pendapatan laki-laki dan perempuan sebagai kriteria standar hidup layak bagi seseorang. Pada kurun waktu 2018 - 2022, pengeluaran cenderung meningkat meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebelum naik kembali. Pandemi Covid-19 menjadi faktor utama yang menyebabkan perubahan terhadap pola konsumsi masyarakat. Pandemi mengubah kebiasaan dan kebutuhan masyarakat akibat terjadinya pembatasan kegiatan sehingga ikut memengaruhi penurunan kebutuhan masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Demak. Menghadapi hal seperti itu, diperlukan kebijakan di bidang ekonomi yang tepat sasaran untuk mempercepat kenaikan taraf hidup masyarakat.

Dari beberapa dimensi komponen penyusun IPG yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan masih terdapat ketimpangan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah baik di pusat dan daerah dalam menyusun program pembangunan yang responsif terhadap gender, mengingat pemerintah menargetkan kesetaraan gender dapat terwujud paling lama pada tahun 2025 mendatang sesuai RPJPN 2005 - 2025. Hal tersebut ditujukan agar perempuan

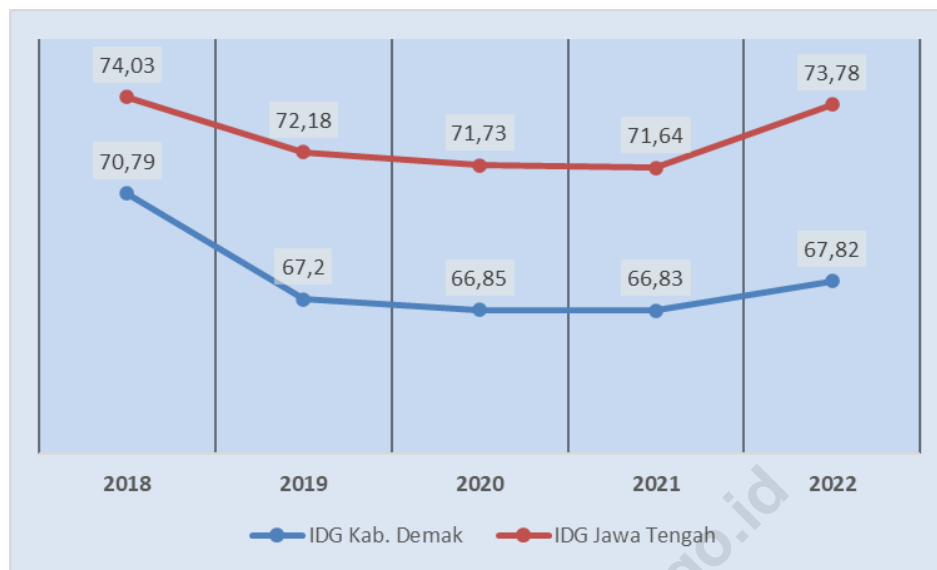
juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

### **3.3 Pemberdayaan Gender**

Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi yang menunjukkan porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran di sini adalah perempuan memiliki peranan yang proporsional dalam hal proses pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sementara menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengupayakan berbagai hal terkait dengan peningkatan kapabilitas perempuan.

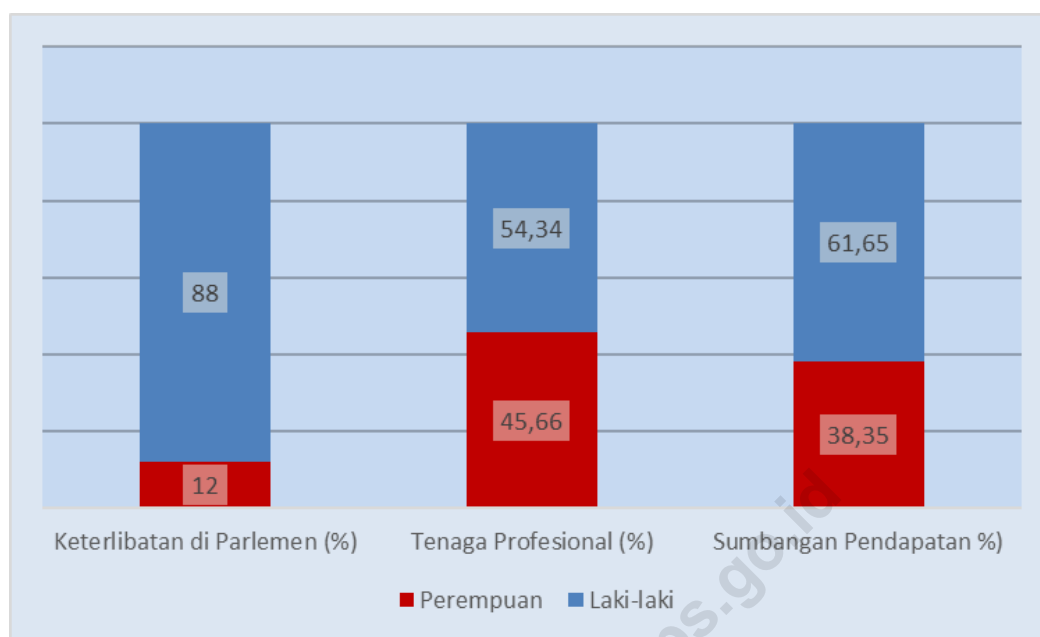
**Gambar 3. 9 Perkembangan IDG Kabupaten Demak dan Jawa Tengah, 2018 - 2022**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Gambar 3.9 menunjukkan tren IDG Kabupaten Demak tahun 2018 hingga 2021 yang mengalami penurunan dan baru naik kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2018, nilai IDG Kabupaten Demak adalah sebesar 70,79 dan menurun menjadi 66,83 pada 2021. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam mengambil keputusan dan kegiatan ekonomi masih kurang dan mencerminkan kurangnya kesetaraan peran gender. Pada tahun 2022, IDG Kabupaten Demak meningkat sebesar 0,99 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut sesuai dengan tren yang terjadi pada nilai IDG Provinsi Jawa Tengah. Namun, terlihat *gap* yang melebar antara nilai IDG kabupaten dan provinsi dengan nilai IDG Kabupaten Demak yang lebih rendah. Hal ini harus menjadi perhatian dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Demak agar tidak tertinggal. Selama periode 2018 hingga 2021, IDG Provinsi Jawa Tengah juga cenderung menurun dari 74,03 menjadi 71,64. Angka tersebut baru meningkat kembali pada tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya keterwakilan kaum perempuan di parlemen daerah.

**Gambar 3.10** Komponen IDG Kabupaten Demak, 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender, tetapi secara umum capaian komponen IDG pada tahun 2022 untuk perempuan di Kabupaten Demak masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, seperti yang disajikan pada Gambar 3.10. Hal ini terjadi di seluruh komponen pembentuk IDG, baik pada partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun perekonomian. Dibandingkan dengan tahun 2021, persentase keterlibatan perempuan di parlemen adalah tetap pada angka 12%. Namun, peran perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan dari 48,85% menjadi 45,66%. Terakhir, peran sumbangan pendapatan perempuan naik dari 37,83% pada tahun 2021 menjadi 38,35% pada tahun 2022.

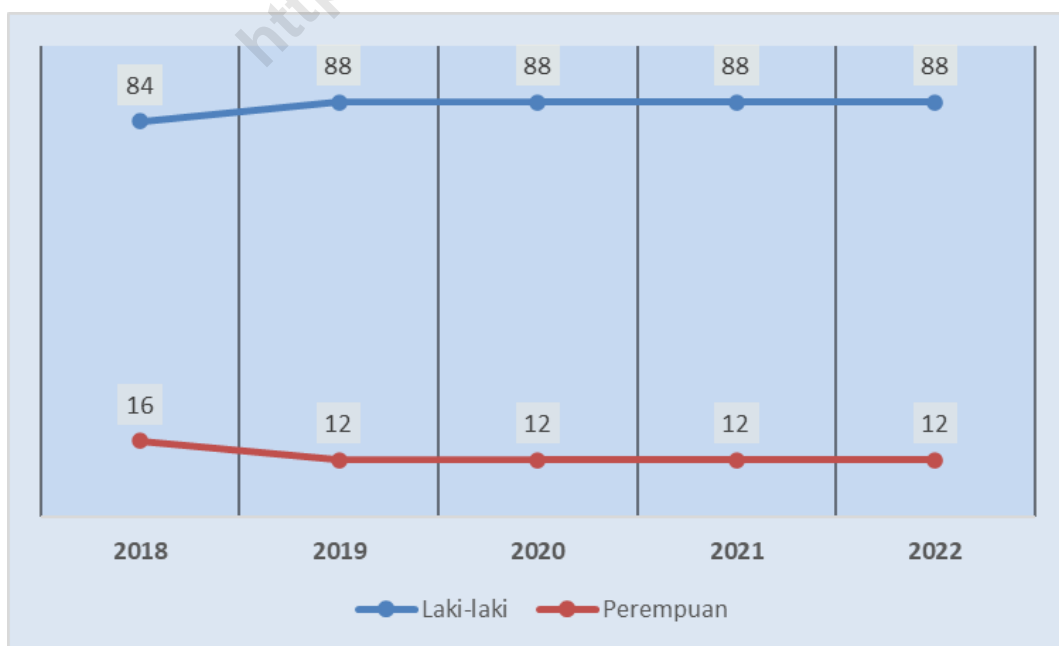
Masih relatif rendahnya capaian perempuan dibandingkan laki-laki tersebut, dimungkinkan disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa anggapan masyarakat (penilaian sosial) yang selama ini menyatakan bahwa mempunyai anak laki-laki lebih banyak menguntungkan. Kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini belum dapat digunakan secara optimal oleh perempuan, sehingga terkesan bahwa perempuan selalu

termarginalkan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki pada setiap komponen pembentuk IDG, akan dibahas dalam uraian keterwakilan perempuan di parlemen; tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan pendapatan.

### 3.3.1 Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Sebagaimana tercantum dalam agenda pembangunan RPJMN 2020 - 2024 dalam hal membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sasaran tersebut juga telah termaktub dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya adalah 30 persen.

**Gambar 3.11 Perkembangan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kabupaten Demak, 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

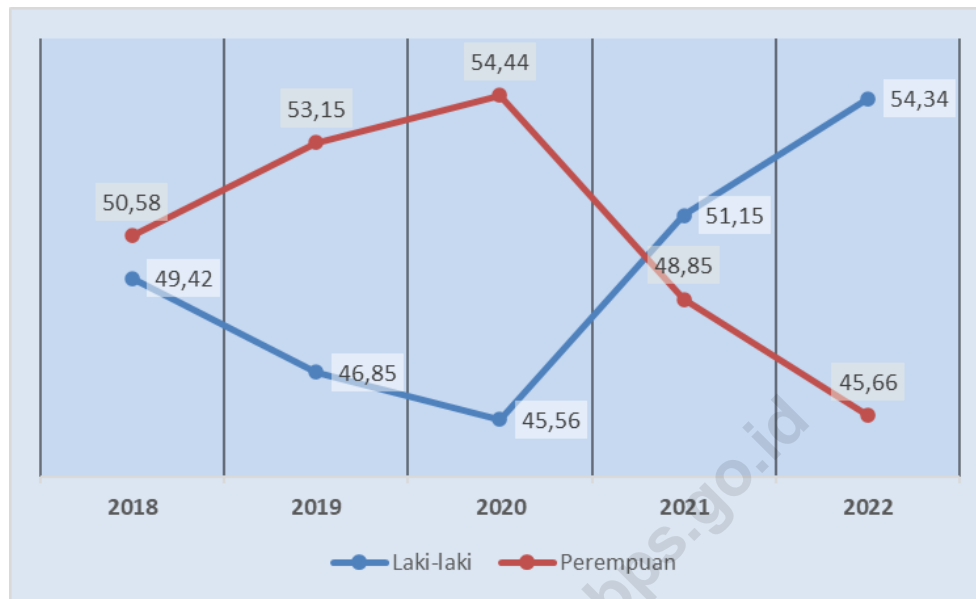
Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas penduduknya, khususnya perempuan, masih menjadi tantangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terjadinya ketimpangan aksesibilitas antara perempuan dengan laki-laki, diantaranya dalam bidang politik. Pada Gambar 3.11 terlihat bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Demak relatif masih kecil, khususnya pada tahun 2019 - 2021. Pada tahun 2018, proporsi perempuan di parlemen Kabupaten Demak sebanyak 16 persen. Angka tersebut belum sesuai dengan kuota target yang ditetapkan yakni 30 persen. Bahkan, jumlah ini menurun setelah pemilihan umum legislatif tahun 2019 lalu menjadi sebesar 12 persen. Pada tahun 2022, jumlah perempuan di bangku parlemen Kabupaten Demak adalah sebanyak 6 kursi dari total 50 kursi. Apabila kuota keterwakilan perempuan di parlemen telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, diharapkan kebijakan yang dibuat dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan karena isu kesetaraan gender akan lebih diperhatikan.

### **3.3.2 Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi**

Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan pada posisi ini memberikan gambaran kemajuan peranan perempuan. Bagaimana perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan manusia serta aktif peran serta dalam pengambilan keputusan yang penting untuk kemajuan suatu bangsa.

Stereotipe yang berkembang dalam masyarakat, menunjukkan bahwa selama ini perempuan dipandang tidak jauh dengan hal-hal yang terkait dengan urusan rumah tangga, padahal sebenarnya perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta dan organisasi lainnya masih relatif kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, dan teknis.

**Gambar 3.12** Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Demak, 2018-2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Pada tahun 2022, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Demak adalah 45,66%. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 - 2022. Bahkan, sejak tahun 2021, persentase perempuan sebagai tenaga profesional menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Demak dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam mengisi pembangunan. Apalagi, dalam kondisi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 ini yang memerlukan peran serta seluruh masyarakat. Pemangku kepentingan perlu untuk terus memperkuat pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendorong perempuan lebih maju dalam mencapai yang optimal sehingga dapat berpeluang dan berkiprah sebagai tenaga profesional.

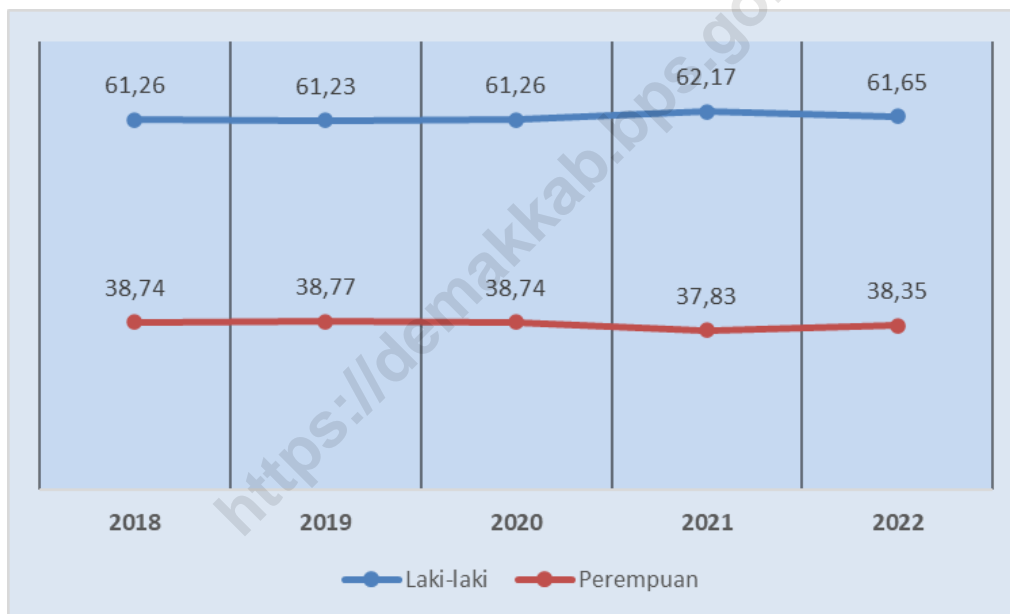
### 3.3.3 Sumbangan Pendapatan

Gambar 3.13 menyajikan perkembangan sumbangan pendapatan baik laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa perkembangan sumbangan tersebut cenderung stagnan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, sumbangan pendapatan perempuan mencapai



38,35 persen. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 37,83 persen. Namun, angka sumbangan pendapatan perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada penghitungan IDG, komponen upah menggunakan data upah buruh di sektor non pertanian. Perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap IDG. Makin besar jarak (*gap*) upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan menyebabkan angka IDG makin kecil.

**Gambar 3.13** Perkembangan Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Demak, 2018 - 2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, antara lain dilatarbelakangi oleh masalah klasik, yaitu perempuan yang bekerja hanya dianggap untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara laki-laki tetap sebagai pencari nafkah utama. Faktor lain yang juga berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Kecenderungan pendidikan perempuan di Kabupaten Demak lebih rendah dibanding pendidikan laki-laki jelas berpengaruh pada perbedaan upah yang diterima.

Data Sakernas BPS menunjukkan bahwa proporsi perempuan bekerja di Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebanyak 224.482 dari 571.566 orang. Artinya, proporsi wanita terhadap angkatan kerja yang bekerja pada 2022 adalah sebesar 39,27%. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Demak masih didominasi oleh laki-laki. Sedikitnya proporsi perempuan yang bekerja memengaruhi sumbangan pendapatan perempuan yang sedikit dibandingkan laki-laki. Apabila upah tenaga kerja dan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan meningkat, proporsi sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat pula. Akhirnya, *gap* sumbangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki akan berkurang.

<https://demakkab.bps.go.id>

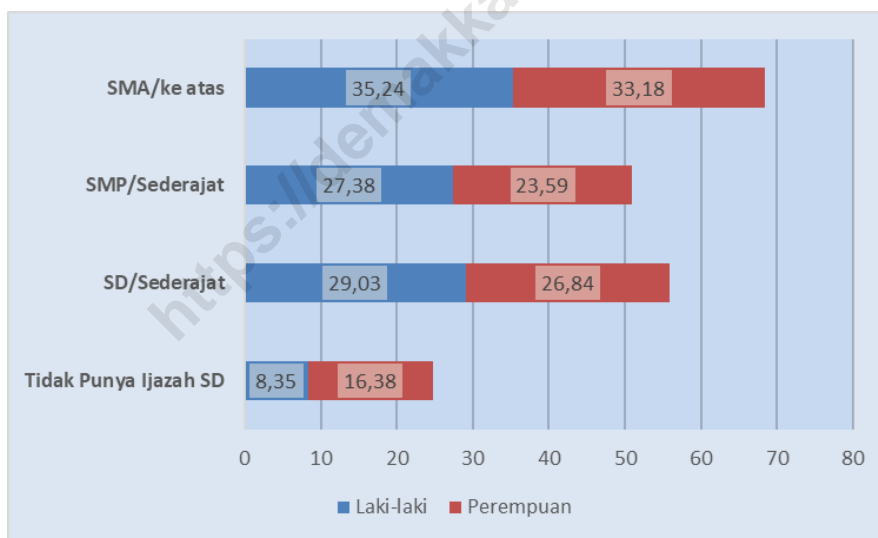
## BAB IV

### GENDER DI PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN

#### 4.1 Gender di Bidang Pendidikan

Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Selama ini, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya terealisasi. Kecenderungannya adalah makin tinggi jenjang pendidikan, makin meningkat kesenjangan gendernya, yaitu proporsi laki-laki yang bersekolah lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan yang bersekolah.

**Gambar 4.1** Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Demak, 2022



Sumber: BPS Kabupaten Demak (diolah)

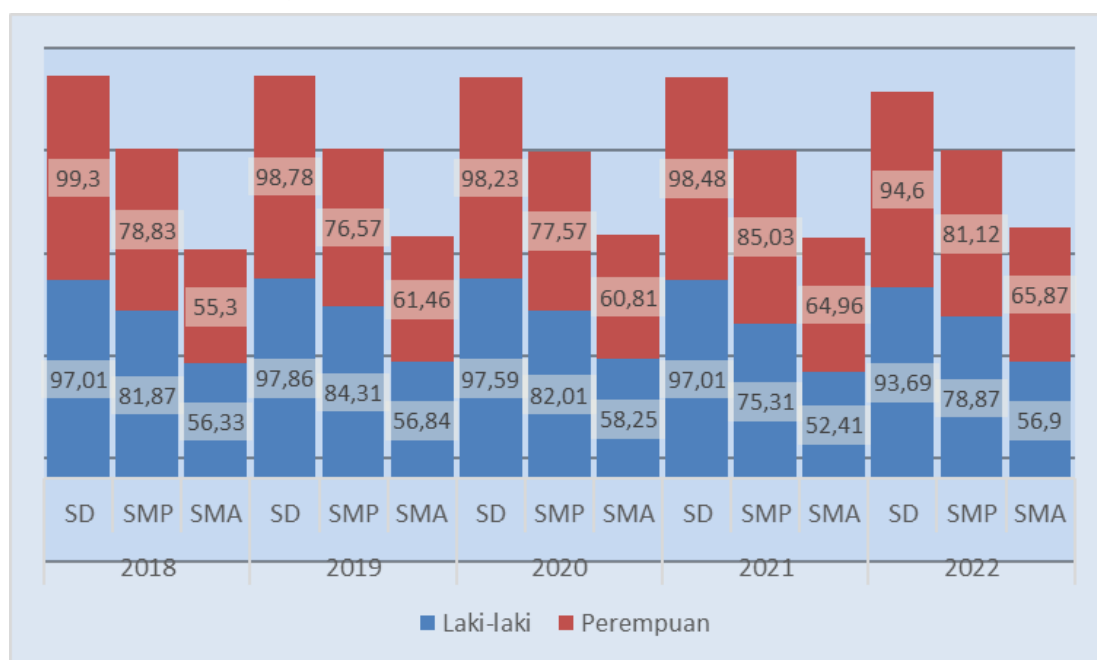
Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, diperoleh bahwa ketimpangan dari aspek pendidikan dapat terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD dengan proporsi penduduk perempuan sebesar 16,38% dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang hanya sebesar 8,35%. Lalu, ketimpangan tersebut juga terlihat pada tingkat pendidikan lainnya dengan penduduk laki-laki memiliki proporsi kepemilikan ijazah pendidikan yang lebih besar dibandingkan perempuan di tingkat SD, SMP, dan SMA ke atas meskipun tidak terlalu

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang mampu menyelesaikan pendidikan formal dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat juga dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). APM adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. APM menunjukkan indikator persentase penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan Gambar 4.2 di bawah, terlihat bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Demak lebih banyak yang mampu menjalani pendidikan dengan tepat waktu dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan pada angka APM perempuan pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang cenderung lebih besar dibandingkan laki-laki. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa persentase perempuan yang bersekolah masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Namun, penduduk perempuan cenderung lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan.

**Gambar 4.2 Rasio APM Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Demak, 2018—2022**



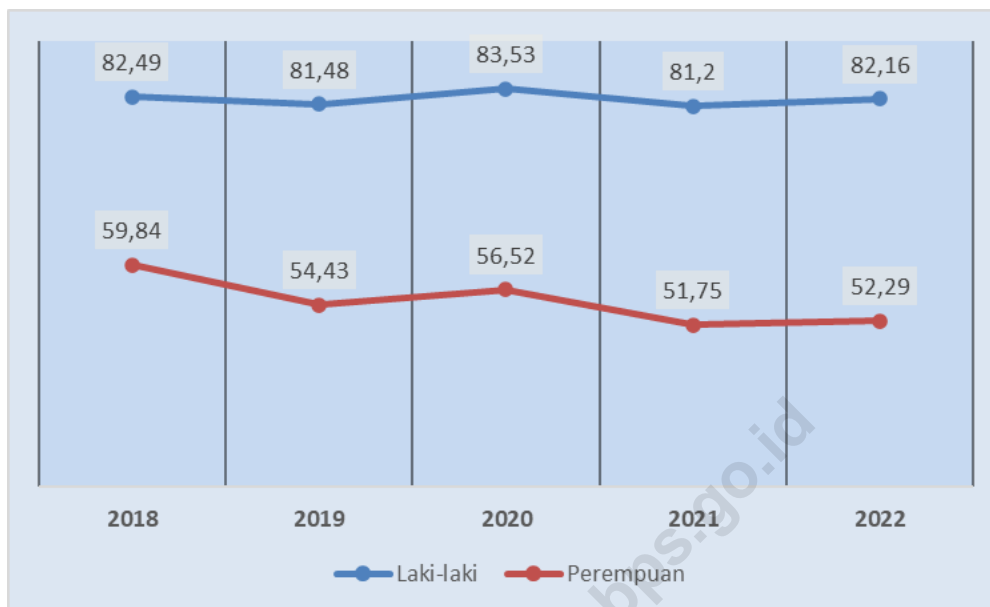
Sumber: BPS Kabupaten Demak (diolah)

## 4.2 Gender di Bidang Ketenagakerjaan

Di tengah kondisi pasca pandemi yang membuka peluang baru untuk mengembalikan kondisi ketenagakerjaan seperti sediakala, peran perempuan sangat penting untuk ikut membantu dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, peluang untuk bekerja dan berusaha masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi tersebut masih ditambah dengan stereotip yang berkembang di masyarakat, yaitu masih terdapat dikotomi pembagian tugas dalam keluarga. Laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan perempuan mengurus rumahtangga. Hal ini menjadikan kesempatan bekerja untuk perempuan menjadi lebih kecil.

Kondisi tersebut sejalan dengan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yang ditunjukkan oleh TPAK tahun 2022 laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, yaitu 82,16 berbanding 52,29. Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, angka TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin dari yang hanya sebesar 51,75 saja di tahun 2021. Namun, kenaikan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan TPAK laki-laki sebesar 0,96 poin dari tahun 2021 yang sebesar 81,20. Hal ini menunjukkan *gap* TPAK laki-laki dan perempuan yang makin besar. Kesenjangan yang timbul tersebut diakibatkan kondisi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan waktu untuk memulihkan keadaan seperti sediakala. Oleh karena itu, masih banyak penduduk perempuan di Kabupaten Demak yang memilih untuk mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja hingga saat ini. Diperlukan penyegeraan dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 agar penduduk perempuan bisa memiliki peran dalam ketenagakerjaan sehingga tidak hanya penduduk laki-laki saja yang aktif dalam dunia kerja,

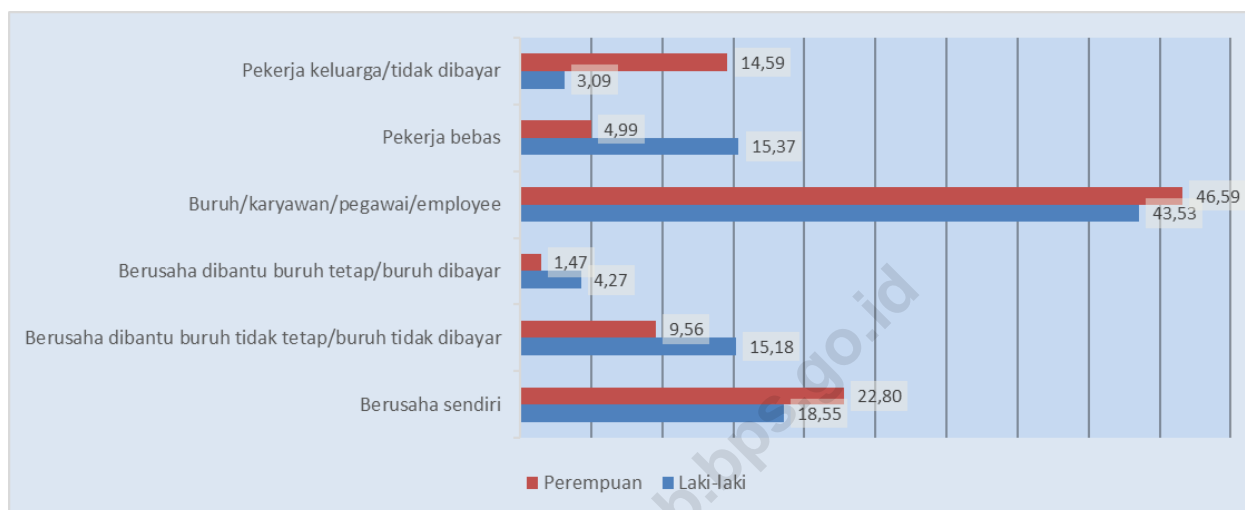
**Gambar 4.3 TPAK Kabupaten Demak Menurut Jenis Kelamin, 2018 - 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Demak (diolah)

Profil ketenagakerjaan perempuan di Kabupaten Demak dapat dianalisis lebih lanjut pada Gambar 4.4 di bawah ini. Terlihat bahwa untuk pekerja keluarga yang tidak dibayar, proporsi penduduk perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yakni sebesar 14,59% dibandingkan 3,09%. Namun, untuk pekerja bebas didominasi oleh penduduk laki-laki yakni sebesar 15,37% dibandingkan dengan perempuan yakni sebesar 4,99%. Uniknya, baik penduduk laki-laki atau pun perempuan, paling banyak memiliki status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai/*employee* yang berturut-turut sebesar 43,53% dan 46,59%. Selain itu, status pekerjaan yang memiliki proporsi yang paling sedikit pada penduduk laki-laki dan perempuan ada pada berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Demak berstatus sebagai buruh dan karyawan, dan hanya sedikit yang melakukan usaha sendiri dengan mempekerjakan karyawan yang tetap atau dibayar. Ini dapat menjadi saran bagi pemerintah untuk bisa memutuskan kebijakan ekonomi yang mendukung buruh dan karyawan seraya memberikan kemudahan bagi masyarakat apabila hendak memulai usaha sendiri.

**Gambar 4.4** Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Demak, 2022



Sumber: BPS Kabupaten Demak (diolah)

<https://demakkab.bps.go.id>



## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, angka IPG dan IDG Kabupaten Demak secara umum masih di bawah angka IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, IPG Kabupaten Demak menunjukkan kenaikan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan, nilai IDG Kabupaten Demak mengalami penurunan pada rentang waktu 2018 - 2021 dan baru mengalami kenaikan pada tahun 2022.
2. IPG Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 91,44 yang artinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 91,16. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Demak makin merata antara laki-laki dan perempuan. Kenaikan angka IPG tersebut didorong oleh kenaikan angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. Bidang pendidikan, secara umum terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan formal adalah lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Demak. Namun, penduduk perempuan cenderung lebih tepat waktu dalam menjalani jenjang pendidikan dibandingkan dengan penduduk laki-laki.
4. IDG Kabupaten Demak pada tahun 2022 adalah sebesar 67,82 yang artinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 66,83. Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan lebih baik dalam mencerminkan kesetaraan peran gender dibandingkan tahun sebelumnya meskipun nilainya masih rendah dibandingkan nilai IDG Provinsi Jawa Tengah.
5. Bidang kesehatan, angka harapan hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

**LAMPIRAN**  
**TABEL-TABEL**

<https://demografi.kab.bps.go.id>

**Tabel 1. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) di Jawa Tengah, 2018-2022**

Kabupaten / Kota	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender				
	2018	2019	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	74.03	72.18	71.73	71.64	73.78
Kabupaten Cilacap	62.11	69.13	70.22	70.67	70.90
Kabupaten Banyumas	68.11	71.92	71.74	70.10	72.77
Kabupaten Purbalingga	75.51	70.60	70.27	70.99	70.09
Kabupaten Banjarnegara	65.12	72.84	73.20	73.79	73.80
Kabupaten Kebumen	68.09	67.15	66.89	66.86	66.87
Kabupaten Purworejo	71.61	70.03	69.83	70.09	71.13
Kabupaten Wonosobo	51.41	46.29	48.70	48.68	49.19
Kabupaten Magelang	71.21	67.74	69.65	69.64	69.66
Kabupaten Boyolali	65.61	81.88	81.95	82.23	82.94
Kabupaten Klaten	60.25	72.35	69.42	71.88	69.39
Kabupaten Sukoharjo	76.17	78.52	77.98	77.69	79.16
Kabupaten Wonogiri	63.80	71.88	71.56	71.55	72.97
Kabupaten Karanganyar	80.51	74.76	74.29	73.38	73.69
Kabupaten Sragen	62.48	65.07	65.20	67.14	69.13
Kabupaten Grobogan	53.70	56.31	57.18	58.03	58.98
Kabupaten Blora	70.72	65.59	64.37	64.36	62.64
Kabupaten Rembang	73.12	65.79	65.78	65.88	66.96
Kabupaten Pati	66.55	66.99	66.69	66.65	68.65
Kabupaten Kudus	62.07	65.24	65.18	65.54	65.69
Kabupaten Jepara	50.62	58.20	55.76	56.66	57.23
Kabupaten Demak	70.79	67.20	66.85	66.83	67.82
Kabupaten Semarang	77.41	74.97	75.40	78.35	75.78
Kabupaten Temanggung	82.01	84.46	84.21	84.56	84.80
Kabupaten Kendal	76.78	77.24	76.96	76.95	77.05
Kabupaten Batang	66.29	63.78	63.81	64.43	64.44
Kabupaten Pekalongan	73.19	70.87	71.68	70.54	71.76
Kabupaten Pemasang	68.95	80.08	80.95	81.27	81.57
Kabupaten Tegal	69.25	72.58	72.12	72.32	73.76
Kabupaten Brebes	60.94	62.04	61.93	61.89	61.89
Kota Magelang	76.30	76.81	76.35	78.65	80.13
Kota Surakarta	77.10	77.88	79.42	79.32	81.10
Kota Salatiga	82.16	76.19	76.07	79.08	79.29
Kota Semarang	75.55	74.57	74.67	73.64	73.93
Kota Pekalongan	68.62	60.95	58.29	57.87	61.37

**Tabel 2. IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen) di Jawa Tengah, 2018-2022**

Kabupaten / Kota	[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	22.00	19.17	18.80	18.33	20.00
Kabupaten Cilacap	16.00	24.00	26.00	26.00	26.00
Kabupaten Banyumas	18.00	22.00	22.00	20.00	22.00
Kabupaten Purbalingga	31.11	22.22	22.22	22.22	22.22
Kabupaten Banjarnegara	17.78	26.00	26.00	26.00	26.00
Kabupaten Kebumen	24.00	22.00	22.00	22.00	22.00
Kabupaten Purworejo	20.00	17.78	17.78	17.78	17.78
Kabupaten Wonosobo	6.67	2.22	4.44	4.44	4.44
Kabupaten Magelang	16.00	12.00	14.00	14.00	14.00
Kabupaten Boyolali	11.11	31.11	31.11	31.11	31.11
Kabupaten Klaten	6.00	18.00	16.00	18.00	14.00
Kabupaten Sukoharjo	20.00	22.22	22.22	22.22	22.73
Kabupaten Wonogiri	8.89	16.00	16.33	16.00	16.00
Kabupaten Karanganyar	28.89	20.00	20.00	18.18	18.18
Kabupaten Sragen	8.89	11.11	11.36	13.33	15.56
Kabupaten Grobogan	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Kabupaten Blora	17.78	13.33	11.11	11.11	8.89
Kabupaten Rembang	22.22	13.33	13.64	13.33	13.33
Kabupaten Pati	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Kabupaten Kudus	6.67	8.89	8.89	8.89	8.89
Kabupaten Jepara	8.00	14.00	12.00	12.00	12.00
Kabupaten Demak	16.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Kabupaten Semarang	22.22	18.00	18.37	22.00	18.00
Kabupaten Temanggung	31.11	33.33	33.33	33.33	33.33
Kabupaten Kendal	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44
Kabupaten Batang	20.00	15.56	15.56	15.91	15.56
Kabupaten Pekalongan	31.11	26.67	27.91	26.67	26.67
Kabupaten Pemalang	16.00	30.00	32.00	32.00	32.00
Kabupaten Tegal	20.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Kabupaten Brebes	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Kota Magelang	20.00	20.00	20.00	24.00	24.00
Kota Surakarta	20.00	20.00	22.22	22.22	24.44
Kota Salatiga	29.17	20.00	20.00	24.00	24.00
Kota Semarang	22.00	20.00	20.41	18.75	18.00
Kota Pekalongan	20.00	11.43	8.82	8.57	11.43
Kota Tegal	36.67	13.33	13.33	13.33	13.33

**Tabel 3. IDG Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (persen) di Jawa Tengah, 2018-2022**

Kabupaten / Kota	[IDG] Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	47.57	49.36	50.20	50.67	50.72
Kabupaten Cilacap	43.68	45.11	43.97	45.69	55.57
Kabupaten Banyumas	46.05	49.40	49.87	49.32	49.49
Kabupaten Purbalingga	44.95	47.36	45.96	50.52	60.21
Kabupaten Banjarnegara	38.52	56.80	49.42	49.92	47.46
Kabupaten Kebumen	46.53	49.12	54.20	56.09	57.01
Kabupaten Purworejo	50.15	52.24	51.86	53.44	46.81
Kabupaten Wonosobo	50.59	49.86	45.64	47.67	49.89
Kabupaten Magelang	47.32	45.92	53.96	55.63	57.50
Kabupaten Boyolali	42.51	45.97	48.14	48.58	54.53
Kabupaten Klaten	52.71	55.73	60.72	58.46	55.05
Kabupaten Sukoharjo	47.37	50.25	54.28	58.12	52.48
Kabupaten Wonogiri	43.12	48.97	44.76	48.31	52.39
Kabupaten Karanganyar	49.22	50.04	55.20	51.13	48.20
Kabupaten Sragen	50.20	49.03	48.95	53.94	57.27
Kabupaten Grobogan	33.69	40.44	44.13	50.18	45.97
Kabupaten Blora	49.90	39.92	45.43	48.48	49.24
Kabupaten Rembang	51.35	51.01	47.13	51.39	46.59
Kabupaten Pati	48.66	50.69	48.95	44.94	52.77
Kabupaten Kudus	44.88	45.70	51.58	49.67	47.26
Kabupaten Jepara	59.30	47.00	45.31	50.57	53.07
Kabupaten Demak	50.58	53.15	54.55	48.85	45.66
Kabupaten Semarang	41.86	45.59	48.28	46.64	46.59
Kabupaten Temanggung	41.09	50.78	52.69	48.14	47.88
Kabupaten Kendal	49.48	48.20	46.10	55.07	52.29
Kabupaten Batang	41.22	52.98	47.93	45.76	48.68
Kabupaten Pekalongan	52.04	47.31	50.65	49.29	48.03
Kabupaten Pemalang	57.19	49.16	50.51	49.40	43.09
Kabupaten Tegal	49.81	50.45	45.41	45.64	50.87
Kabupaten Brebes	41.71	47.10	52.75	49.33	45.27
Kota Magelang	47.02	52.51	55.07	59.89	46.81
Kota Surakarta	45.06	50.89	51.06	49.78	57.17
Kota Salatiga	51.95	48.30	48.80	48.61	53.22
Kota Semarang	49.62	51.22	51.15	51.30	49.78
Kota Pekalongan	46.69	55.43	52.64	50.90	54.65
Kota Tegal	53.09	58.36	55.89	58.61	45.53

**Tabel 4. IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen) di Jawa Tengah, 2018-2022**

Kabupaten / Kota	[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	34.28	34.31	34.29	34.60	34.59
Kabupaten Cilacap	26.22	26.35	26.44	26.83	26.48
Kabupaten Banyumas	30.77	30.84	30.87	30.67	31.40
Kabupaten Purbalingga	30.12	30.24	30.19	30.61	29.76
Kabupaten Banjarnegara	28.80	28.93	28.88	29.40	28.33
Kabupaten Kebumen	25.59	25.67	25.79	25.83	25.20
Kabupaten Purworejo	33.99	34.10	34.03	34.33	34.46
Kabupaten Wonosobo	24.56	24.68	24.67	24.31	24.32
Kabupaten Magelang	37.52	37.77	37.82	37.82	37.25
Kabupaten Boyolali	40.54	40.70	40.73	40.97	41.70
Kabupaten Klaten	37.77	37.81	37.72	37.78	37.45
Kabupaten Sukoharjo	41.04	41.06	41.02	41.42	40.98
Kabupaten Wonogiri	39.22	39.25	39.20	38.63	38.98
Kabupaten Karanganyar	38.13	38.14	38.11	38.41	38.12
Kabupaten Sragen	37.11	37.18	37.14	37.15	36.37
Kabupaten Grobogan	25.32	25.43	25.56	25.85	26.06
Kabupaten Blora	34.73	34.76	34.88	34.21	33.67
Kabupaten Rembang	31.72	31.82	31.78	31.92	32.50
Kabupaten Pati	31.38	31.42	31.36	31.64	31.68
Kabupaten Kudus	41.02	41.09	41.05	41.45	40.71
Kabupaten Jepara	23.73	23.74	23.66	24.08	24.11
Kabupaten Demak	38.74	38.77	38.74	37.83	38.35
Kabupaten Semarang	45.79	45.83	45.72	46.19	46.20
Kabupaten Temanggung	40.85	40.86	40.79	41.19	40.90
Kabupaten Kendal	34.91	35.30	35.27	35.35	34.75
Kabupaten Batang	28.24	28.32	28.43	28.92	27.96
Kabupaten Pekalongan	26.18	26.19	26.29	25.79	25.84
Kabupaten Pemasang	35.30	35.34	35.22	35.59	34.78
Kabupaten Tegal	29.04	29.05	29.08	29.09	29.25
Kabupaten Brebes	25.09	25.28	25.20	25.35	24.92
Kota Magelang	41.81	41.83	41.97	42.15	41.84
Kota Surakarta	43.93	43.95	44.07	43.57	43.85
Kota Salatiga	41.36	41.40	41.42	41.08	40.40
Kota Semarang	36.90	37.21	37.13	37.46	38.05
Kota Pekalongan	28.37	28.53	28.50	28.21	28.04
Kota Tegal	30.24	30.47	30.62	30.19	29.86

**Tabel 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Tengah, 2018-2022**

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	91.95	91.89	92.18	92.48	92.83
Kabupaten Cilacap	86.53	86.67	86.69	87.00	87.02
Kabupaten Banyumas	87.94	88.20	88.27	88.54	89.15
Kabupaten Purbalingga	92.32	92.68	92.78	93.08	93.21
Kabupaten Banjarnegara	95.18	95.38	95.28	95.32	95.19
Kabupaten Kebumen	93.09	93.34	93.05	93.06	93.26
Kabupaten Purworejo	95.11	94.92	94.96	95.33	95.59
Kabupaten Wonosobo	92.91	92.72	92.75	92.78	92.65
Kabupaten Magelang	92.23	91.78	91.81	91.89	92.21
Kabupaten Boyolali	93.24	93.50	94.19	94.22	94.37
Kabupaten Klaten	96.00	96.04	96.17	96.00	96.11
Kabupaten Sukoharjo	96.73	96.58	96.49	96.52	96.96
Kabupaten Wonogiri	91.13	91.41	91.08	91.07	91.73
Kabupaten Karanganyar	96.61	96.48	96.52	96.63	97.03
Kabupaten Sragen	92.27	91.40	91.62	91.68	92.24
Kabupaten Grobogan	85.81	85.98	86.14	85.89	86.18
Kabupaten Blora	83.79	83.96	83.88	84.59	84.92
Kabupaten Rembang	86.49	86.85	87.00	87.32	87.60
Kabupaten Pati	91.50	91.60	91.50	92.21	92.42
Kabupaten Kudus	92.89	92.90	92.75	92.96	93.56
Kabupaten Jepara	90.66	90.91	90.99	91.28	91.44
Kabupaten Demak	90.40	90.57	90.90	91.16	91.30
Kabupaten Semarang	96.35	96.40	96.38	96.61	96.60
Kabupaten Temanggung	95.62	95.10	95.31	95.74	95.99
Kabupaten Kendal	92.96	92.85	93.19	93.30	93.79
Kabupaten Batang	90.65	91.08	91.47	91.86	91.88
Kabupaten Pekalongan	92.87	92.58	92.48	92.56	92.72
Kabupaten Pemalang	85.49	85.81	85.83	86.49	86.72
Kabupaten Tegal	86.95	86.74	86.79	87.53	88.22
Kabupaten Brebes	86.24	86.35	86.36	86.65	87.19
Kota Magelang	96.07	95.51	95.27	95.54	95.91
Kota Surakarta	96.82	96.72	96.84	96.89	96.84
Kota Salatiga	95.12	95.00	95.18	95.37	95.44
Kota Semarang	95.82	95.55	95.49	95.67	95.93
Kota Pekalongan	94.59	94.92	95.17	95.42	95.32
Kota Tegal	93.45	93.37	93.18	93.26	93.39

**Tabel 6. Sampling Error APS, APM, Jenis Kelamin Laki-Laki, 2022**

<b>Karakteristik</b>	<b>Laki-laki</b>				
	<i>Rasio Estimate</i>	<i>Standar Error</i>	<i>Ratio Standard Error</i>	<i>Confidence Interval 95%</i>	
				<i>Lower Limit</i>	<i>Upper Limit</i>
<b>APS 7-12 tahun</b>	23,46	6,05	25,77	11,61	35,31
<b>APS 13-15 tahun</b>	98,53	0,86	0,87	96,84	100,22
<b>APS 16-18 tahun</b>	98,49	1,48	1,50	95,59	101,38
<b>APM SD</b>	73,72	5,87	7,97	62,21	85,23
<b>APM SMP</b>	93,69	2,23	2,38	89,32	98,05
<b>APM</b>	78,87	6,10	7,74	66,91	90,82
<b>SMA</b>	56,90	6,95	12,21	43,28	70,52

<https://demakkab.bps.go.id>



**Tabel 7. Sampling Error, APS, APM, Jenis Kelamin Perempuan, 2022**

Karakteristik	Perempuan				
	Rasio Estimate	Standar Error	Ratio Standard Error	Confidence Interval 95%	
				Lower Limit	Upper Limit
<b>APS 7-12 tahun</b>	43,29	8,43	19,47	26,77	59,82
<b>APS 13-15 tahun</b>	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>APS 16-18 tahun</b>	98,11	1,34	1,37	95,48	100,74
<b>APM SD</b>	72,90	5,83	8,00	61,48	84,33
<b>APM SMP</b>	94,60	2,25	2,37	90,20	99,00
<b>APM</b>	81,12	4,59	5,66	72,12	90,12
<b>SMA</b>	65,87	6,20	9,42	53,71	78,03

<https://demakkab.bps.go.id>

**Tabel 8. Sampling Error APS, APM, Menurut Jenis Kelamin, 2022**

Karakteristik	Laki-laki + Perempuan				
	Rasio Estimate	Standar Error	Ratio Standard Error	Confidence Interval 95%	
				Lower Limit	Upper Limit
<b>APS 7-12 tahun</b>	32,90	5,24	15,92	22,63	43,16
<b>APS 13-15 tahun</b>	99,21	0,46	0,47	98,31	100,12
<b>APS 16-18 tahun</b>	98,29	0,99	1,01	96,34	100,24
<b>APM SD</b>	73,32	4,33	5,91	64,83	81,81
<b>APM SMP</b>	94,11	1,59	1,69	91,00	97,22
<b>APM</b>	80,06	3,77	4,71	72,68	87,45
<b>SMA</b>	61,36	4,80	7,82	51,96	70,77

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN DEMAK**